

ANALISIS KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2017-2021

Florentio Korti  
NPP. 30.0186  
*Asdaf Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat*  
*Program Studi Keuangan Publik*  
*Email : [florentio.korti19@gmail.com](mailto:florentio.korti19@gmail.com)*

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. H. Maisondra, SH, MH, M.Pd, Dipl.Ed, M.A.P

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** The author focuses on the problem of the low financial performance of the regional government of Padang City in the 2017-2021 budget year. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the financial performance of the regional government of Padang City for the 2017-2021 budget period. **Method:** This study uses a qualitative-descriptive research method with an inductive approach and analysis of the stages of financial performance according to Mahmudi's theory. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews (5 informants), observation and documentation. **Results:** The findings obtained by the authors in the study based on the results of the ratio analysis of regional financial performance show that the City of Padang is still relatively low in supporting the implementation of regional autonomy. **Conclusion:** Based on the results of the ratio analysis of regional financial performance, it shows that the City of Padang is still low in supporting the implementation of regional autonomy, this is due to the high level of dependence of the regional government of Padang City on transfer funds provided by the central government. It is recommended to further increase PAD revenues for the City of Padang.

*Keywords: Analysis, Financial Performance, Analysis of financial ratios.*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus kepada permasalahan masih rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang pada tahun periode anggaran 2017-2021. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang tahun periode anggaran 2017-2021. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap tahap kinerja keuangan menurut Teori Mahmudi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (5 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian berdasarkan hasil analisis rasio kinerja keuangan daerah memperlihatkan Kota Padang tergolong masih rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis rasio kinerja keuangan daerah memperlihatkan Kota Padang tergolong masih rendah dalam mendukung

pelaksanaan otonomi daerah, hal ini dikarenakan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kota Padang terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Disarankan untuk lebih meningkatkan penerimaan PAD Kota Padang.

Kata Kunci : Analisis, Kinerja Keuangan, Analisis rasio keuangan.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi keuangan Pemerintah Daerah kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas publik inilah yang menjadi kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. dengan adanya tuntutan akuntabilitas tersebut bisa mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya (Sari et al., 2021).

Memunculkan kemandirian daerah menjadi salah satu tujuan yang ingin diwujudkan dari pelaksanaan otonomi daerah. Guna memunculkan kemandirian daerah dan terlaksanakannya desentralisasi. Desentralisasi daerah mewujudkan sebuah pelaksanaan kebebasan bagi daerah atau otonomi daerah, sehingga tugas dan wewenang kepala daerah untuk mengurus dan mengatur roda pemerintahan di tingkat daerah harus melihat pada potensi yang dimiliki daerah dan seluruh kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah (Rohmah, 2022). Pemerintah mesti bahu-membahu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah nya dikarenakan pada dasarnya semakin besar PAD terhadap APBD menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Keintjem & Murni, 2019). Keahlian Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya yang dijabarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memperlihatkan keahlian pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan (Sari et al., 2021).

Kewenangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola keuangannya sebagaimana yang tertuang di dalam program Nawa Cita ketujuh. Pada kinerja keuangan daerah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola keuangan daerah antara lain; kondisi daerah, prioritas yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah, kesejahteraan di setiap lapisan masyarakat, serta pelaksanaan dekonsentrasi, desentralisasi, ataupun tugas pembantuan.

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Total PAD (Rp)
2017	327,92 M	35,29 M	12,64 M	172,80 M	548,65 M
2018	348,90 M	41,59 M	10,26 M	87,20 M	487,94 M
2019	388,10 M	48,24 M	11,71 M	98,06 M	546,11 M
2020	344,74 M	37,17 M	12,33 M	105,65 M	499,90 M
2021	376,22 M	43,51 M	12,77 M	106,43 M	538,93 M

Berdasarkan tabel yang telah tersaji di atas menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah sudah dapat dikategorikan cukup bila dilihat dari sumber pendapatan asli daerah yang tersedia. Dari keseluruhan setiap sumber PAD sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun masih ada penurunan di tahun tertentu, namun tingkat penurunan yang terjadi pada pos tahun tertentu tidak terlalu signifikan dan masih diambang batas wajar. Namun bila melihat pada tahun 2020 secara garis besar pos sumber PAD mengalami penurunan yang cukup jauh, hal ini bisa terjadi dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah daerah Kota Padang dihadap dengan pandemi covid-19 yang mempengaruhi penurunan penerimaan pendapatan PAD. Akan tetapi, bila melihat kepada sektor penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan bagian dari sisi potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang seharusnya peluang yang besar dapat diberikan untuk Pendapatan Asli Daerah. Tidak dapat disangkal bahwa dana transfer pusat menjadi sumber terbesar yang mendominasi Pendapatan Daerah Kota Padang. Daerah harus bisa memperkecil dan membatasi ketergantungan ini dengan memanfaatkan berbagai kemampuan daerah sehingga pendapatan daerah terbesar berasal dari PAD di daerah tersebut.

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kinerja keuangan Kota Padang terkait pemberian hak otonom kepada Pemerintah Kota Padang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang ditargetkan dapat melakukan pengelolaan dan peningkatan terkait kemampuan fiskal sebagai suatu tanggung jawab dari daerah untuk peningkatan masyarakat yang lebih sejahtera yang dapat dipantau dengan cara melihat kemampuan suatu daerah untuk melakukan pembiayaan terkait segala kegiatan daerahnya yang bisa dilihat dari segi kinerja keuangan daerah yang memiliki tujuan untuk bisa memaksimalkan nilai dari pemerintah daerah. Pegawai yang kualitasnya masih kurang kompeten seperti operator yang ahli dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan yang bisa mempermudah dalam mengelola keuangan. Efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dilihat dari pemerintah daerah yang masih kurang mampu dalam menggali potensi yang dimiliki daerah dan terdapat kelalaian pada tahap

perencanaan terkait pengelolaan keuangan daerah. Pelayanan Publik, berdasarkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja maupun dana transfer yang berada pada kondisi yang fluktuatif dan masih minimnya kepercayaan masyarakat terkait kinerja pemerintah daerah yang mempengaruhi kepada tingkat penerimaan daerah. Partisipasi yang signifikan besar masih bersumber dari dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat untuk pendapatan daerah di Kota Padang. Oleh karena itu, kualitas kinerja keuangan daerah Kota Padang sangat dipengaruhi oleh hal tersebut

### **1.3. Penelitian terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Vici Anjela Keintjem, Sri Murni. (2019) berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017- 2019 menemukan berdasarkan rasio keuangan daerah yaitu Rasio Efektivitas PAD sudah sangat efektif, Rasio Keserasian Belanja modal sudah cukup baik. Sedangkan untuk Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan PAD belum cukup baik. Penelitian dari Arnaldi, Irdha Yusra. (2020) berjudul Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah menemukan bahwa perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan Kota Padang masih belum ideal. Selanjutnya penelitian dari Muhammad Yunus Kasim, Mohammad Ega Nugraha, Siti Marwiah, Rosmida Haisi. (2021) dari hasil analisis ditemukan bahwa PAD masih kurang efektif. Sedangkan untuk tingkat aktivitas, alokasi belanja modal masih besar dibandingkan belanja rutin. Sementara itu, rasio laju pertumbuhan, baik rasio pertumbuhan PAD, belanja rutin, maupun belanja modal masih dikategorikan tidak berhasil. Vitalis Ari Widiyaningsih, Margaretha Prihatiningsih. (2021) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017-2019 hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Surakarta secara umum dikatakan baik. Markus Rivaldo Yulinchton, Maria Bernadette Nani Ariani, Nunuk Triwahyuningtyas. (2022) berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Rasio Keuangan (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang Periode (2012-2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dalam laporan keuangan daerah Kabupaten Tegal memiliki pola instruktif, sedangkan rasio efektivitas berada pada daerah tidak efektif.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penerapan analisis dalam analisa tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rentang waktu 5 tahun periode anggaran tahun terakhir, metodenya yang digunakan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian Vitalis Ari Widiyaningsih, Margaretha Prihatiningsih. dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Mahmudi (2016) yang menyatakan rasio pengukuran kinerja keuangan dapat terjadi pada empat tahap,

yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, dan rasio efisiensi PAD.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai tingkat dari kinerja keuangan dari Pemerintah daerah Kota Padang tahun anggaran 2017-2021 dan apa saja faktor penghambat kinerja keuangan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan induktif dan menganalisis data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Menurut Creswell (2016: 4) penelitian kualitatif merupakan sebuah tahapan guna memahami dan memperdalam sebuah makna dari individu atau sekelompok yang telah dianggap bersumber dari permasalahan sosial atau kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif memiliki tujuan yang pada dasarnya mengenai informasi tentang peristiwa utama yang diangkat dalam penelitian, lokasi penelitian dan partisipan penelitian (Creswell, 2016: 167). Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dokumentasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, Kepala Subbagian Keuangan dan Program BPKAD Kota Padang, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kota Padang Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD Kota Padang, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Padang.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang pada 5 tahun periode anggaran terakhir menggunakan perhitungan rasio dari Mahmudi yang menyatakan bahwa yang menyatakan rasio pengukuran kinerja keuangan dapat terjadi pada empat tahap, yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, dan rasio efisiensi PAD. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Rasio Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi fiskal menjelaskan terkait kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD yang digunakan dalam hal memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah. Pada rasio ini dijelaskan terkait derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Apabila kontribusi PAD semakin tinggi maka kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi akan semakin meningkat dengan rumus:

$$\text{RDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$2017 = \frac{548,65 \text{ M}}{2.092,28 \text{ T}} \times 100\% = 27,9 \%$$

$$2018 = \frac{487,94 \text{ M}}{2.160,38 \text{ T}} \times 100\% = 22,5 \%$$

$$2019 = \frac{546,11 \text{ M}}{2.350,12 \text{ T}} \times 100\% = 23,2 \%$$

$$2020 = \frac{499,90 \text{ M}}{2.167,63 \text{ T}} \times 100\% = 23 \%$$

$$2021 = \frac{538,93 \text{ M}}{2.222,27 \text{ T}} \times 100\% = 24,2 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas menjelaskan bahwa terkait rasio derajat desentralisasi Kota Padang tahun anggaran 2017 di dapati angka sebesar 27,9%. Namun ketika berlanjut pada tahun anggaran 2018 terjadi penurunan hingga berada pada angka 22,5%. Pada tahun anggaran 2019 mulai terjadi sedikit peningkatan menjadi 23,2% dan menjad relatif sama pada tahun anggaran 2020 yakni 23%. Lanjut pada tahun anggaran 2021 kembali terjadi peningkatan dan berada pada angka sebesar 24,2%. Apabila dilakukan pengukuran berdasarkan skala interвал yang terdapat pada tabel 2.1 maka akan tepat berada pada interвал 20,01-30,00 yang dimaknai dengan rasio derajat desentralisasi Kota Padang berada pada skala interval cukup. Hal ini dikarenakan oleh kontribusi PAD yang berada pada skala menengah ke bawah dan terkait juga dengan target yang ditentukan terkait PAD yang tidak telalu besar yang berakibat kepada kinerja keuangan Kota Padang yang harus ditingkatkan dalam memaksimalkan penerimaan PAD untuk dapat membiayai segala bentuk penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Padang.

### 3.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu daerah dalam hal pembiayaan setiap kegiatan pemerintahan baik itu berupa pelayanan kepada masyarakat, pembangunan daerah, ataupun berbagai hal lainnya yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan fungsi dari perhitungan dengan rasio kemandirian keuangan dengan rumus:

$$\text{RKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{transfer pusat} + \text{provinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

Diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$2017 = \frac{548,65 \text{ M}}{1.524,19 \text{ T}} \times 100\% = 36\%$$

$$2018 = \frac{487,94 \text{ M}}{1.570,19 \text{ T}} \times 100\% = 31\%$$

$$2019 = \frac{546,11 \text{ M}}{1.696,99 \text{ T}} \times 100\% = 32,2\%$$

$$2020 = \frac{499,90 \text{ M}}{1.551,96 \text{ T}} \times 100\% = 32,2\%$$

$$2021 = \frac{538,93 \text{ M}}{1.571,9 \text{ T}} \times 100\% = 34,2\%$$

Berdasarkan perhitungan memperlihatkan dengan jelas terkait persentase dari tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Padang dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2017 yakni sebesar 36% dan persentase terendah terjadi pada tahun anggaran 2018 yakni 31%. Sementara itu pada tahun anggaran 2019-2021 persentase kemandirian keuangan daerah Kota Padang terus mengalami peningkatan dengan rincian pada tahun anggaran 2019 rasio kemandirian keuangan berada pada angka 32,2%. Pada tahun anggaran 2020 rasio kemandirian keuangan daerah terlihat berada pada angka yang relatif sama yakni 32,2%. Pada tahun anggaran berikutnya yakni tahun 2021 rasio kemandirian keuangan mengalami peningkatan dan berada pada angka sebesar 34,2%. Sehingga berdasarkan 5 (lima) tahun anggaran tersebut terkait rasio kemandirian keuangan daerah Kota Padang diperoleh rata-rata sebesar 33,12%. Nilai rata-rata tersebut apabila dikategorikan ke dalam skala interval yang terdapat pada tabel 2.3 maka berada pada skala 25-50% yang dapat diartikan bahwa kemandirian keuangan Kota Padang berada dalam skala interval rendah sehingga memperlihatkan adanya pola hubungan konsultatif yang mengandung makna bahwa pemerintah pusat masih berperan aktif dalam pembiayaan terkait dana penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan tingkat dari kontribusi PAD rendah sehingga kemandirian daerah juga tergolong rendah.

### 3.3. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efektifitas digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu pemerintah daerah dalam hal merealisasikan penerimaan daerah yang dilakukan perbandingan dengan target yang ditetapkan atas dasar potensi riil daerah. Apabila diperoleh hasil perhitungan dari rasio efektifitas yang semakin tinggi, maka hal tersebut berkaitan dengan tingkat kemampuan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan yang semakin efektif. Adapun rumus yang dipakai dalam menentukan tingkat efektifitas dari keuangan suatu daerah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$2017 = \frac{548,65 \text{ M}}{490,93 \text{ M}} \times 100\% = 111,75\%$$

$$2018 = \frac{487,94 \text{ M}}{601,25 \text{ M}} \times 100\% = 81,15\%$$

$$2019 = \frac{546,11 \text{ M}}{824,38 \text{ M}} \times 100\% = 66,24\%$$

$$2020 = \frac{499,90 \text{ M}}{882,00 \text{ M}} \times 100\% = 56,67\%$$

$$2021 = \frac{538,93 \text{ M}}{889,90 \text{ M}} \times 100\% = 60,56\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas memperlihatkan bahwa persentase pengelolaan PAD Kota Padang selama lima tahun periode anggaran terakhir berada pada angka 75,27%. Apabila berpatokan kepada skala interval maka dapat diartikan bahwa Kota Padang terkait efektifitas pengelolaan PAD dikategorikan ke dalam kurang efektif. Namun bila melihat kepada tahun anggaran 2017 kinerja Pemerintah Kota Padang mencapai target. Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pengelolaan PAD lima tahun periode anggaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Pemerintah Kota Padang dalam hal pemanfaatan terkait potensi daerah sebagai sumber-sumber pendapatan asli daerah masih kurang efektif. Oleh karena itu, total dari Pendapatn Asli Daerah belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

### 3.4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi dipakai guna memperlihatkan terkait gambaran kinerja pemerintah daerah terkait melakukan pembiayaan guna belanja daerah atas dasar total total realisasi pendapatan daerah yang terdapat di dalam APBD daerah tersebut. Dalam pembiayaan semua belanja daerah, rasio efisiensi dijadikan sebagai alat untuk tolak ukur guna menentukan terkait tingkat efisiensi dari pendapatan daerah yang digunakan. Untuk dapat memperkuat hasil penilaian dari kinerja keuangan suatu daerah maka dapat dengan menentukan terkait hasil rasio efisiensi keuangan daerah tersebut. Adapun dalam menentukan tingkat efisiensi suatu keuangan daerah dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$2017 = \frac{2.077,46 \text{ T}}{2.092,28 \text{ T}} \times 100\% = 99,29\%$$

$$2018 = \frac{2.177,97 \text{ T}}{2.160,38 \text{ T}} \times 100\% = 100,81\%$$

$$2019 = \frac{2.351,50 \text{ T}}{2.350,12 \text{ T}} \times 100\% = 100,05\%$$

$$2020 = \frac{2.139,91 \text{ T}}{2.167,63 \text{ T}} \times 100\% = 98,72\%$$

$$2021 = \frac{2.211,84 \text{ T}}{2.222,27 \text{ T}} \times 100\% = 99,53\%$$

Berdasarkan data yang telah diolah yang dapat dilihat pada perhitungan di atas memperlihatkan bahwa terkait rasio efisiensi Kota Padang periode tahun anggaran 2017-2021 terdapat kondisi yang fluktuatif. Atas dasar grafik tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pada periode tahun anggaran 2017-2021 terkait tingkat efisien keuangan daerah Kota Padang digolongkan ke dalam kriteria tidak efisien. Dengan artian bahwa terkait kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang dalam mengelola pendapatan daerahnya dalam rangka pembiayaan seluruh kegiatan belanja daerah masih dinilai tidak efektif dikarenakan total belanja daerah lebih besar daripada total realisasi pendapatan daerah. Oleh karena itu, rasio efisiensi keuangan pemerintah Kota Padang pada tahun periode anggaran

2017-2021 memiliki persentase sebesar 99,68% yang tergolong ke dalam kategori “Tidak Efisien”.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kompetensi pegawai menjadi faktor yang begitu menentukan terkait peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang yang berladaskan kepada hasil pengamatan peneliti. Oleh karena itu, meningkatkan kompetensi pegawai terus dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan memberikan fasilitas serta dukungan kepada setiap pegawai BPKAD yang berkeinginan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah ataupun para pegawai yang berkeinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan dalam rangka meningkatkan keahlian atau skill yang sesuai dengan bidangnya masing-masing dan ditargetkan kelak bisa diterapkan saan berdinan kembali di BPKAD sehingga hal tersebut akan berdampak kepada meningkatnya kinerja keuangan daerah Kota Padang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telag dilakukan oleh Arnaldi, Irdha Yusra. (2020) dan juga memperkuat penelitian tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang adalah dengan meningkatkan efektifitas di setiap belanja daerah yang telah dianggarkan di dalam APBD. Pencapaian tujuan yang berasal dari setiap kebijakan guna mendapatkan hasil guna dari efektifitas itu sendiri. Suatu kegiatan maupun belanja bisa dikategorikan efektif bila pengaruhnya besar kepada peningkatan pelayanan public sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Vici Anjela Keintjem, Sri Murni. (2019).

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa terkait analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang, sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisis rasio kinerja keuangan daerah memperlihatkan Kota Padang tergolong masih rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Adapun terkait hal tersebut dibuktikan dengan hasil rasio dari masing-masing indikator kinerja keuangan sebagai berikut:

- a. Hasil analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang berada pada angka rata-rata 24,16% yang menunjukkan bahwa kemampuan Kota Padang masih kurang dalam membiayai kegiatan pemerinta daerah.
- b. Hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan berada pada angka rata-rata 33,12% yang menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki kemandirian keuangan yang rendah dengan pola hubungan konsultatif yang mengandung makna bahwa pemerintah pusat masih berperan aktif dalam pembiayaan terkait dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

- c. Hasil analisis Rasio Efektifitas Pengelolaan PAD Kota Padang berada pada angka 75,27% yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Padang termasuk ke dalam kategori kurang efektif dalam mengelola PAD.
  - d. Hasil analisis Rasio Efisiensi Pengelolaan PAD Kota Padang berada pada angka rata-rata 99,68% yang menunjukkan tidak efisiennya pemerintah dalam mengelola PAD.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Kota Padang adalah sebagai berikut :
- a. Pegawai yang kualitasnya masih kurang kompeten seperti operator yang ahli dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan yang bisa mempermudah dalam mengelola keuangan.
  - b. Efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dilihat dari pemerintah daerah yang masih kurang mampu dalam menggali potensi yang dimiliki daerah dan terdapat kelalaian pada tahap perencanaan terkait pengelolaan keuangan daerah.
  - c. Pelayanan Publik, berdasarkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja maupun dana transfer yang berada pada kondisi yang fluktuatif dan masih minimnya kepercayaan masyarakat terkait kinerja pemerintah daerah yang mempengaruhi kepada tingkat penerimaan daerah.
3. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah Kota Padang, antara lain:
- a. Meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan pemerintah daerah dengan cara memberikan fasilitas kepada pegawai dalam hal pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan daerah maupun memberikan studi lanjut guna peningkatan kompetensi pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
  - b. Meningkatkan efisiensi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari awal tahap perencanaan sampai ke tahap pertanggungjawaban dari rangkaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah guna peningkatan penerimaan daerah dan percepatan realisasi anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan retribusi yang dapat meningkatkan penerimaan daerah sehingga bisa dipakai kembali guna

pelaksanaan pembangunan serta memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada periode anggaran tertentu saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mahmudi.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Padang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J. (2017). *Social and Administrative Sciences*. 4(June), 3–5.
- Keintjem, V. A., & Murni, S. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017- 2019. *International Standard of Serial Number: 2303-1174*, 10(33), 953–962.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Rohmah, I. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Rasio Keuangan (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang Periode 2012-2016). *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 11(juni), 303–314. <http://eprints.umm.ac.id/38300/>
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, September, 408–425.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabet.